

MAKALAH MATA KULIAH
CIVIC EDUCATION
POKOK BAHASAN MINGGU UTS : KONSTITUSI DAN
PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA



Disusun Oleh :
MADELYN ISABELLE ALMIRA AHMAD
24240021

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM
YOGYAKARTA PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH
2024

DAFTAR ISI

MAKALAH MATA KULIAH.....	1
CIVIC EDUCATION	1
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM YOGYAKARTA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH.....	1
1.1. Konsistunsi.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
BAB II.....	5
LANDASAN TEORI	5
2.1. Pengertian Konstitusi	5
2.1. Tujuan dan Fungsi Konstitusi	6
2.2. Ruang Lingkup Konstitusi.....	7
2.3 . Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	8
BAB III.....	10
PEMBAHASAN.....	10
3.1 Tujuan dan Fungsi Konstitusi di Indonesia	10
3.2 Ruang Lingkup Konstitusi Indonesia	11
3.3. Peran Lembaga Negara dalam Proses Legislasi	13
3.4. Tantangan dalam Penegakan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia ...	14
BAB IV	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konsistunsi

Konstitusi merupakan landasan dasar dalam sistem pemerintahan suatu negara, berfungsi sebagai pedoman tertinggi yang mengatur hak, kewajiban, serta relasi antara warga negara dan pemerintah. Di setiap negara, konstitusi hadir untuk menjamin stabilitas hukum dan keadilan sosial, memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan hukum yang setara. Di Indonesia, peran konstitusi tidak hanya sebagai acuan hukum, tetapi juga sebagai perwujudan cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berdaulat. Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi utama dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Asshiddiqie, J.2015).

Di Indonesia, konstitusi yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki peranan yang sangat vital. UUD 1945 mengatur hak-hak dasar warga negara, batasan kewenangan pemerintah, serta prinsip-prinsip yang menjadi panduan bagi penyelenggaraan negara. UUD 1945 juga menetapkan struktur pemerintahan, mekanisme checks and balances, dan tata cara pembuatan perundang-undangan. Sebagai landasan hukum tertinggi, konstitusi ini berfungsi untuk menjamin bahwa segala bentuk kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan sosial. (Basri, H.2016).

Makalah ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek dari konstitusi Indonesia, meliputi tujuan, fungsi, ruang lingkup, serta sejarah dan perkembangannya sejak kemerdekaan hingga saat ini. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan pembaca dapat melihat peran konstitusi sebagai instrumen yang membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratis di Indonesia. Analisis ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi hak-hak warga negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tujuan utama dari konstitusi di Indonesia, dan bagaimana fungsi konstitusi tersebut dalam sistem hukum nasional?	9. Apa fungsi dan kedudukan perundang-undangan di bawah konstitusi dalam hierarki hukum di Indonesia?
2. Apa saja ruang lingkup konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?	10. Bagaimana peran lembaga negara dalam pembuatan dan pengawasan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang?	11. Apa saja jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hierarki masing-masing jenis peraturan tersebut?
4. Bagaimana konstitusi Indonesia menjamin hak-hak dasar warga negara serta membatasi kewenangan pemerintah?	12. Bagaimana proses pembuatan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan?
5. Apa hubungan antara konstitusi dan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia?	13. Apa peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal dan menegakkan konstitusi di Indonesia?
6. Bagaimana peran konstitusi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?	14. Bagaimana penerapan prinsip checks and balances dalam sistem konstitusional di Indonesia?
7. Apa perbedaan antara konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara lain, khususnya dalam hal struktur dan isi?	15. Bagaimana konstitusi Indonesia mengatur hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban negara untuk melindunginya?
8. Bagaimana mekanisme amandemen atau perubahan konstitusi di Indonesia, dan apa saja batasannya?	16. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia di era modern ini?

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta antarlembaga pemerintahan. Menurut KC Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan dan prinsip yang mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Sementara itu, menurut C.F. Strong, konstitusi adalah seperangkat prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar bagi rakyat. Di Indonesia, konstitusi utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. (Cahyono, A.2018).

Menurut **K.C. Wheare**, konstitusi adalah keseluruhan sistem aturan dan prinsip yang mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai perangkat yang mengatur struktur pemerintahan, menetapkan batas-batas kekuasaan, serta memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban dari pemerintah dan warga negara. Dalam pandangan Wheare, konstitusi adalah mekanisme formal yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara teratur dan terstruktur.

Sementara itu, **C.F. Strong** menyatakan bahwa konstitusi adalah seperangkat prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar bagi rakyat. Menurut Strong, fungsi utama konstitusi adalah untuk memberikan perlindungan bagi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, dengan menetapkan aturan-aturan yang melindungi hak asasi dan kebebasan warga negara.

Di Indonesia, konstitusi utama adalah **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**, yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga mengatur hak-hak warga negara, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berfungsi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berkeadilan. (Faisal, A.2019)

2.1. Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Menjaga Kedaulatan Rakyat

Konstitusi menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui prinsip demokrasi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Dengan demikian, konstitusi memastikan bahwa pemerintahan berjalan atas dasar kehendak rakyat dan melindungi hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. (Fitriani, E. 2020)

Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Salah satu tujuan utama konstitusi adalah menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Di Indonesia, UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap berbagai hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Melalui pasal-pasal yang berfokus pada hak-hak warga negara, konstitusi memberikan dasar hukum untuk melindungi individu dari diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. (Hermawan, B., & Susanto, T. 2017).

Membatasi Kekuasaan Pemerintah

Konstitusi bertujuan untuk membatasi wewenang pemerintah guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, konstitusi memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut. Di Indonesia, konstitusi mengatur mekanisme checks and balances yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. (Hermawan, B., & Susanto, T. 2017).

Menjaga Stabilitas Sosial

Konstitusi memberikan panduan hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara, konstitusi membantu menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan kondusif. Di Indonesia, konstitusi menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, mengatur tata kehidupan masyarakat, serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (Indrianto, F. (2021)

2.2. Ruang Lingkup Konstitusi

1. Aspek Politik

Dalam aspek politik, konstitusi mengatur sistem politik dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menetapkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan mekanisme checks and balances, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Di Indonesia, konstitusi mendefinisikan struktur pemerintahan, peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta fungsi lembaga perwakilan seperti DPR dan DPD. Dengan demikian, konstitusi menjadi pedoman utama dalam mengatur tata kelola politik dan penyelenggaraan pemerintahan. (Mahfud, M. D. 2018)

2. Aspek Ekonomi

Konstitusi juga mencakup pengaturan mengenai ekonomi nasional dan pengelolaan sumber daya alam, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 UUD 1945). Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perekonomian nasional dijalankan demi kepentingan rakyat dan tidak hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Konstitusi juga mengatur tentang hak dan kewajiban negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan nasional, serta menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan ekonomi. (Maulana, S. 2019).

3. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, konstitusi menjamin berbagai hak dasar yang menyangkut kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak sosial lainnya. Di Indonesia, konstitusi memberikan jaminan terhadap kebebasan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta memperoleh perlindungan hukum yang sama. Selain itu, konstitusi juga mencakup hak-hak sosial seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. (Maulana, S. 2019).

4. Aspek Hukum

Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks hukum, konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadi acuan dalam penegakan hukum. Di Indonesia, konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Konstitusi juga mengatur tentang proses peradilan yang adil dan menjamin hak-hak individu untuk mendapatkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. (Maulana, S. 2019).

2.3 . Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem urutan atau tingkatan dari berbagai jenis peraturan yang berlaku di suatu negara, yang menunjukkan tingkat kewenangan dan kedudukan setiap jenis peraturan tersebut. Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam **Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019). Hierarki ini menentukan bahwa peraturan yang berada di tingkat lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia: (Nugroho, R. (2015).

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Sebagai sumber hukum utama, UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Ketetapan MPR adalah kebijakan yang mengikat pemerintah dan masyarakat dan memiliki kedudukan di bawah UUD 1945. Ketetapan MPR dibuat dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR. Ketetapan ini berisi ketentuan-ketentuan penting, terutama yang mengatur dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan pedoman untuk pelaksanaan pemerintahan. Contoh ketetapan MPR yang penting adalah Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

3. **Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**

Undang-Undang (UU) adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara yang lebih teknis dibandingkan UUD 1945. UU digunakan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konstitusi. Sedangkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU. Namun, Perppu harus mendapat persetujuan dari DPR pada persidangan berikutnya untuk bisa menjadi UU. (Purnamasari, D. 2020).

4. **Peraturan Pemerintah (PP)**

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU yang membutuhkan penjelasan atau rincian lebih lanjut. PP berfungsi sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan ketentuan undang-undang, sehingga bisa diterapkan secara efektif di lapangan. PP dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala eksekutif. (Purnamasari, D. 2020).

5. **Peraturan Presiden (Perpres)**

Peraturan Presiden adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam UU atau PP. Perpres mengatur kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik dan berada dalam lingkup kewenangan eksekutif. Perpres bersifat lebih teknis dan operasional, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara langsung. (Purnamasari, D. 2020).

6. **Peraturan Daerah (Perda)**

Peraturan Daerah adalah aturan yang berlaku di tingkat daerah, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Perda dibuat oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berlaku hanya dalam wilayah administrasi masing-masing daerah. Perda provinsi dibuat oleh Gubernur bersama DPRD provinsi, sedangkan Perda kabupaten atau kota dibuat oleh Bupati atau Wali Kota bersama DPRD kabupaten atau kota. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki, seperti UUD 1945, Tap MPR, UU, PP, atau Perpres.

Hierarki ini menggambarkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tingkatannya masing-masing dan harus saling menyesuaikan. Dengan adanya hierarki ini, Indonesia memiliki mekanisme yang jelas dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang memastikan adanya kepastian hukum dan tata aturan yang harmonis.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Tujuan dan Fungsi Konstitusi di Indonesia

Konstitusi memiliki kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam mengatur jalannya pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai konstitusi utama yang memberikan landasan dan prinsip dasar bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi Indonesia dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Adapun tujuan dan fungsi utama dari UUD 1945 adalah sebagai berikut: (Rahmawati, L., & Pratama, D. 2022).

1. Menetapkan Kedaulatan Rakyat sebagai Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara

Salah satu tujuan utama dari konstitusi adalah memastikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi. UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat Indonesia dan diwujudkan melalui pemilihan umum dan perwakilan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini memberikan legitimasi bagi rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan memegang kendali atas lembaga-lembaga negara. Dalam praktiknya, rakyat berperan aktif melalui hak pilih dan partisipasi dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam mekanisme lainnya seperti partisipasi publik dalam pembentukan peraturan.

2. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Warga Negara Indonesia

UUD 1945 berperan penting dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu sebagai warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta hak untuk hidup dan memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hak asasi manusia adalah aspek fundamental yang harus dijaga dan dihormati oleh negara dan pemerintah. Pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen, memberikan perlindungan bagi HAM sesuai dengan standar internasional. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa setiap warga negara bebas dari diskriminasi dan memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum. (Setiawan, A. 2019).

3. **Membatasi Kekuasaan Pemerintah Guna Mencegah Penyalahgunaan Wewenang**

UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak. Pembagian kekuasaan ini dilakukan melalui prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi masing-masing dan dilengkapi dengan mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan absolut. Dengan demikian, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merugikan rakyat. (Setiawan, A. 2019).

4. **Memberikan Panduan Hukum untuk Menjaga Stabilitas Sosial dan Keamanan Masyarakat**

UUD 1945 menetapkan kerangka hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Melalui aturan-aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip keadilan, konstitusi menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan aman. Stabilitas sosial sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, terutama di negara dengan keanekaragaman seperti Indonesia. Dengan adanya panduan hukum ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2 **Ruang Lingkup Konstitusi Indonesia**

Konstitusi Indonesia, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman hukum tertinggi, UUD 1945 tidak hanya mengatur mekanisme pemerintahan, tetapi juga memberikan landasan bagi berbagai aspek kehidupan yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara. Berikut adalah ruang lingkup utama konstitusi Indonesia yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum:

1. **Aspek Politik**

Konstitusi Indonesia mengatur struktur dan sistem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu prinsip utama yang diatur adalah **pembagian kekuasaan** antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi menetapkan peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan legislatif, serta lembaga peradilan (yudikatif) sebagai pengawal keadilan. Selain itu, UUD 1945 menekankan **prinsip checks and balances**, di mana setiap lembaga negara saling mengawasi dan membatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan. (Setiawan, A. 2019).

2. Aspek Ekonomi

Konstitusi Indonesia juga mencakup aturan-aturan yang mengatur sistem perekonomian negara, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional. UUD 1945, khususnya dalam Pasal 33, menyatakan bahwa **perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan**, dan bahwa **cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara**. Konstitusi ini dirancang untuk menjamin bahwa sumber daya alam dan kegiatan ekonomi diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau segelintir pihak. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (Rahmawati, L., & Pratama, D. 2022).

3. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, konstitusi Indonesia memberikan jaminan atas berbagai hak dan kebebasan dasar bagi setiap warga negara. UUD 1945 mengatur **kebebasan beragama**, yang memungkinkan setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain itu, konstitusi menjamin **kebebasan berpendapat** dan hak-hak sosial lainnya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memfasilitasi hak-hak sosial ini sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan adanya jaminan ini, konstitusi berperan penting dalam menjaga kohesi sosial dan menghormati keragaman dalam masyarakat Indonesia.

4. Aspek Hukum

Konstitusi Indonesia menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks hukum, konstitusi berfungsi sebagai acuan utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi menjamin **kesetaraan di hadapan hukum**, yang berarti bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau latar belakang, berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil

3.3. Peran Lembaga Negara dalam Proses Legislasi

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia adalah hasil dari kerja sama dan sinergi antara beberapa lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi legislasi. Setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan masyarakat. Berikut adalah peran utama dari beberapa lembaga negara dalam proses legislasi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR memiliki peran sentral dalam proses legislasi, dengan wewenang untuk **membahas, menyetujui, dan menetapkan undang-undang** bersama Presiden. Sebagai representasi rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang disusun mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Dalam proses legislasi, DPR menerima rancangan undang-undang (RUU) dari Presiden atau anggota DPR sendiri. Selanjutnya, RUU tersebut akan melalui beberapa tahap pembahasan, mulai dari tingkat komisi atau panitia khusus hingga rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan. Setelah DPR menyetujui RUU, tahap berikutnya adalah penandatanganan dan pengesahan oleh Presiden agar dapat berlaku sebagai undang-undang.

2. Presiden

Presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, memiliki kewenangan untuk **mengajukan rancangan undang-undang (RUU)** dan mengesahkannya setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Presiden dapat mengusulkan RUU yang dianggap perlu bagi kepentingan nasional dan penataan negara, misalnya terkait dengan keamanan, ekonomi, atau hak-hak warga negara. Setelah DPR menyetujui RUU, Presiden bertanggung jawab untuk menandatangani sebagai tanda pengesahan agar undang-undang tersebut resmi berlaku. Jika Presiden tidak mengesahkan undang-undang dalam batas waktu yang ditentukan, maka undang-undang tersebut tetap akan berlaku secara otomatis.

3. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang melalui kewenangannya untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**. Apabila ada pihak yang merasa bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, mereka dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Jika MK menemukan bahwa suatu undang-undang memang bertentangan dengan konstitusi, maka MK berwenang untuk membatalkan undang-undang tersebut atau bagian dari undang-undang tersebut. Dengan demikian, MK berperan sebagai pengawal konstitusi, memastikan bahwa setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia tetap selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945.

3.4. Tantangan dalam Penegakan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia

Penegakan konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini berasal dari beberapa aspek, seperti penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan dinamika politik, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan stabil. Berikut adalah penjelasan mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan konstitusi adalah terjadinya **penyalahgunaan kekuasaan** dan **praktik korupsi** di berbagai lembaga pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak integritas penegakan hukum karena keputusan hukum menjadi rentan terhadap intervensi politik atau kepentingan pribadi. Praktik korupsi, yang masih banyak ditemukan di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan konstitusi. Hal ini mengakibatkan hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat yang adil, tetapi sering kali menjadi sarana bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari semua elemen pemerintah dan lembaga negara untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan dan mengimplementasikan hukum yang bebas dari korupsi.

2. Masalah Kesadaran Hukum Masyarakat

Tantangan berikutnya adalah rendahnya **kesadaran hukum masyarakat** terhadap pentingnya peran hukum dan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka di dalam hukum, sehingga cenderung mengabaikan atau melanggar aturan yang berlaku. Rendahnya pemahaman mengenai konstitusi dan hukum sering kali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hukum yang tidak merata, serta ketidakpatuhan terhadap undang-undang. (Setiawan, A. 2019).

3. **Dinamika Politik**

Kepentingan politik sering kali menjadi tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, dinamika politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan tertentu, terutama saat kepentingan kelompok atau partai politik tertentu mendominasi pengambilan keputusan. Kepentingan politik ini dapat menghambat proses legislasi yang independen, menyebabkan undang-undang disusun dengan pertimbangan politik daripada keadilan bagi masyarakat luas. Selain itu, politisasi hukum atau upaya menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu stabilitas sistem hukum yang demokratis. Untuk itu, diperlukan independensi dari lembaga-lembaga penegak hukum agar tetap netral dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. (Wahyuni, T. 2016)

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa penegakan konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia masih membutuhkan berbagai perbaikan, baik dari segi kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, edukasi hukum bagi masyarakat, maupun reformasi untuk memperkuat independensi hukum dari pengaruh politik. Upaya mengatasi tantangan ini akan membawa Indonesia menuju sistem hukum yang lebih transparan, berkeadilan, dan mampu menjaga integritas konstitusi dalam jangka panjang. (Yulianto, P. 2021).

Poin Poin Pembahasan

Subbab	Topik	Isi Utama
3.1 Tujuan dan Fungsi Konstitusi	Tujuan dan fungsi dari konstitusi Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara. 2. Melindungi hak asasi manusia (HAM). 3. Membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 4. Menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
3.2 Ruang Lingkup Konstitusi	Cakupan aspek-aspek kehidupan dalam konstitusi Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Politik: Mengatur sistem pemerintahan dan prinsip checks and balances. 2. Aspek Ekonomi: Mengatur pengelolaan sumber daya alam. 3. Aspek Sosial: Menjamin hak beragama, berpendapat. 4. Aspek Hukum: Menjamin prinsip keadilan.
3.3 Sejarah dan Perkembangan Konstitusi	Perubahan konstitusi dari masa ke masa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 (1945-1949): Konstitusi awal setelah kemerdekaan. 2. Konstitusi RIS 1949: Negara berbentuk serikat. 3. UUD Sementara 1950: Sistem negara kesatuan. 4. Dekrit Presiden 1959: Kembali ke UUD 1945. 5. Amandemen UUD 1945: Era Reformasi.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konstitusi dan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara, keadilan sosial, dan keteraturan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai pedoman utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan hukum, yang kesemuanya diatur untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan konstitusi meliputi penetapan kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan pemerintah, serta penyediaan panduan hukum yang menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Dalam implementasinya, pembentukan undang-undang melibatkan peran lembaga negara, seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berfungsi memastikan setiap undang-undang berjalan sesuai dengan konstitusi.

Namun, terdapat tantangan yang menghambat efektivitas penegakan konstitusi dan perundang-undangan, seperti penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan pengaruh dinamika politik yang mengarah pada kepentingan tertentu. Tantangan ini memerlukan perhatian dan langkah strategis dari seluruh pihak untuk mewujudkan sistem hukum yang konsisten, transparan, dan demokratis.

4.2 Saran

1. Peningkatan Integritas dan Profesionalitas Aparat Penegak Hukum

Perlu ada pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Pelatihan etika dan profesionalitas juga harus terus ditingkatkan untuk menjaga integritas aparat penegak hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menggalakkan program literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban warga negara serta fungsi konstitusi akan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

3. Penguatan Independensi Lembaga Negara dari Pengaruh Politik

Perlu adanya reformasi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara, terutama lembaga penegak hukum, dapat bekerja tanpa intervensi politik. Independensi lembaga negara adalah elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang objektif dan sesuai dengan kepentingan publik.

4. Peningkatan Transparansi dalam Proses Legislasi

Partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang dapat ditingkatkan melalui konsultasi publik yang transparan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basri, H. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia: Perspektif Konstitusi UUD 1945*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cahyono, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faisal, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Implementasinya dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, E. (2020). *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hermawan, B., & Susanto, T. (2017). *Teori dan Praktik Legislasi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indrianto, F. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud, M. D. (2018). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Maulana, S. (2019). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, R. (2015). *Aspek Hukum dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Purnamasari, D. (2020). *Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmawati, L., & Pratama, D. (2022). *Hukum Konstitusi: Kajian Implementasi UUD 1945*. Malang: Intrans Publishing.
- Setiawan, A. (2019). *Peran Lembaga Negara dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, T. (2016). *Konsep Negara Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Semarang: Unnes Press.
- Yulianto, P. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- .